

KEBIJAKAN TRUMP MENGENAI PENANGANAN TERORISME DALAM PERSPEKTIF ISLAM RAHMATAN LIL-ALAMIN

Abdul Wahid, Dwi Ari Kurniawati
Pascasarjana Universitas Islam Malang
Email: visibos@yahoo.com

Abstrak

Sejumlah aksi terorisme di beberapa negara, terutama yang menimpa di sejumlah tempat di Amerika Serikat telah mengundang reaksi dari Presiden AS Donal J. Trump. Reaksi Trump ditujukan pada imigran muslim yang dianggap telah menjadi kelompok yang paling bertanggungjawab terhadap terorisme. Reaksi ini dinilai oleh banyak pihak sebagai reaksi yang tidak rasional, karena menempatkan Islam dan komunitas muslim sebagai musuh utama. Trump disini benar-benar belum memahami kehadiran agama Islam diantara agama-agama lain di muka bumi. Trump tidak melihat kesejatan misi Islam yang bersubstansi *rahmatan lil alamin*, yakni agama Islam yang tidak memaksakan kehendak, apalagi sampai mengajarkan doktrin-doktrin terhadap yang membolehkan kekerasan atau kekejaman di muka bumi, melainkan sebagai agama yang mendoktrinkan keselamatan dan kebahagiaan universal.

Kata Kunci: *radikalisme, terorisme*

Abstract

A number of acts of terrorism in several countries, especially those that happened in some places in the United States have invited a reaction from US President Donald J. Trump. Trump's reaction is aimed at Muslim immigrants who are considered to be the most responsible group against terrorism. This reaction is seen by many as an irrational reaction, because it places Islam and the Muslim community as the main enemy.

Trump here really does not understand the presence of Islam among other religions on earth. Trump does not see the authenticity of an Islamic mission that is sublime to the *rahmatan lil alamin*, that is, the religion of Islam which does not impose the will, let alone teach doctrines against which it allows violence or cruelty on earth but as a religion that indulges universal salvation and happiness.

Keywords: *radicalism, terrorism*

Pendahuluan

Presiden Amerika Serikat menjadi salah satu Presiden Donald J. Trump yang memberi tema aktual setidaknya-tidaknya di tahun 2017. Keaktualan teman Trump ini mengundang pro kontra yang perlu dikritisi, baik yang berhubungan dengan kebijakan politik dalam negeri maupun luar negerinya.

Sebagai Presiden negeri berlabel adidaya, tampaknya Trump menjadikannya sebagai kesempatan untuk memproduksi berbagai kebijakan yang mengundang reaksi masyarakat dunia. Terbukti, masyarakat internasional pun cepat mereaksi apa yang disampaikan atau kebijakan yang dikeluarkan Trump sebagai obyek yang “menarik”.

Salah satu kebijakan Trump di tahun 2017 ini adalah memerintahkan Kementrian Dalam Negeri untuk memperketat seleksi terhadap siapapun yang hendak bekerja ke

Amerika. Kebijakan pengetatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi mereka yang mungkin bersimpati terhadap kelompok ekstrim.

Memang sejak kampanye untuk pemilihan Presiden AS, Trump gencar sekali menyampaikan ancaman terhadap berbagai kelompok ekstrim. Trump tidak takut kalah atau gagal menjadi Presiden AS. Bagi Trump, barangkali yang penting dalam pikirannya, AS harus tetap menjadi negara utama yang gencar memerangi ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme di dunia ini, khususnya yang mengancam AS atau negara-negara yang menjadi sekutu AS. Intinya di berbagai sektor apapun, Trump berupaya mengaitkannya dengan terorisme atau menjadikan terorisme sebagai musuh utamanya.

Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim di muka bumi ini, tentu saja yang paling menunjukkan reaksi terhadap kebijakan Trump adalah Indonesia, apalagi, *pertama*, terkesan kuat kalau kebijakan Trump ditujukan untuk menempatkan Islam sebagai Ancaman serius, dan *kedua*, banyaknya terjadi gerakan radikalistik yang pelakunya berasal dari seseorang atau sekelompok orang komunitas muslim, adahal Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia

Reaksi masyarakat Indonesia itu juga wajar, karena selama ini, apalagi dalam beberapa kasus aksi terorisme seperti ledakan bom, posisi Indonesia di mata internasional gampang ditemplatkannya sebagai negara yang "mendukung" terjadinya terorisme atau menyediakan akar penyebab yang membuat terorisme gampang tumbuh subur.

Selain Trump, masyarakat dunia memang harus membaca perkembangan terorisme. Karena

seperti disebut oleh Frans Hendra Winata, bahwa saat ini, terorisme adalah tantangan utama yang sedang dihadapi oleh seluruh negara atau masyarakat di dunia. Kemunculan paham tersebut dipicu oleh paham fanatik, paham radikal, dan paham ekstrem (ekstrimisme) yang dianut oleh sekelompok orang tertentu, dengan motif dan tujuan tertentu. Trump merupakan salah satu "anggota" masyarakat dunia yang menunjukkan reaksi seperti itu.

Dinamika Penyikapan terhadap Terorisme

Dunia terorisme harus terus dikaji atau dipelajari. Keharusan edukatif ini sudah menjadi bagian dari penyikapan positif terhadap terorisme. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump yang berkaitan dengan terorisme, juga menjadi bukti penyikapan bahwa Trump menyadari kalau terorisme merupakan jenis kejahatan istimewa (*extra ordinary crime*) yang "hadir" di tengah masyarakat atau bangsa manapun di muka bumi.

"Teroris tidak akan pernah mati", demikian pernyataan Abraham Milasovi mengingatkan setiap pemimpin negara dan perangkatnya. Teroris akan selalu hidup seiring atau sejalan dengan bentuk dan dinamika kehidupan masyarakatnya. Karakter dan ideologi, serta agama teroris berpangkal pada karakter, ideologi, dan agama masyarakat dimana teroris itu bergaul dan terlibat pergulatan.

Penyikapan terhadap terorisme itu juga ditunjukkan oleh juga ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo seperti dalam pernyataannya "Kepada seluruh masyarakat, seluruh rakyat di seluruh pelosok Tanah Air, saya sampaikan agar semuanya tetap tenang dan menjaga persatuan. Tetapi kita semua juga tetap harus waspada

dan bersatu melawan terorisme ini.” Apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini sebagai bentuk reaksi terhadap berbagai peristiwa terorisme yang terjadi di tanah air seperti aksi pengeboman yang terjadi di Kampung Melayu, Mei 2017 dan aksi teror yang terjadi pada hari raya Idul Fitri di Mapolda Sumatera Utara.

Sikap Presiden Jokowi itu memang sudah seharusnya, karena di negeri ini banyak terjadi aksi terorisme bermodus pengeboman yang menggemparkan Jakarta Pusat dan umumnya rakyat Indonesia dan masyarakat dunia. Terorisme telah memberikan ujian berkali-kali terhadap konstruksi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya di ranah stabilitas keamanan Indonesia.

Teroris menjadi gambaran riil wajah negara atau perjalanan suatu rezim. Ketika rezim Orde Baru menggunakan paradigma ideologi represip dan monolitik, teroris nyaris tidak pernah mencuat ke permukaan. Paradigma rezim yang sangat eksklusif dan militeristik telah berdampak menutup kran bagi tumbuhnya gerakan-gerakan radikalistik. Begitu sedikit muncul gerakan yang berbau “beda” dengan ideologi negara, maka kelompok seperti ini langsung ditumpas atau disumbatnya.

Kosakata “melawan negara, aliran kiri, organisasi tanpa bentuk, atau bertentangan dengan Pancasila nyaris selalu diidentikkan dengan gerakan berpola subversi, yang nota bene menjadi ancaman utama bangsa yang wajib dibasmi atau dihabisi sejak dini. Dalam konstruksi negara versi rezim Orba, stabilitas sosial dan keamanan negara menjadi tujuan utamanya.

Dari sisi orientasi harmonisasi atau tertib sosial (*social order*), rezim Orba memang sukses dalam

mengeliminasi atau mengalahkan terorisme, akan tetapi dari ranah demokrasi yang berbasis kemerdekaan berfikir, berpendapat, berorganisasi, dan beroposisi, paradigma negara yang berpola monolitik dan eksklusif justru diidentikkan oleh rakyat sebagai “*state terrorism*” (terorisme oleh negara).

Ketika rezim telah bergeser ke orde reformasi, kran demokratisasi terbuka lebar. Segala hasrat rakyat atau “nafsu” subyek seseorang atau sekelompok orang untuk dan atas nama meluruskan, memperbaiki, dan membawa negara ke jalan yang benar, berkeadilan, dan berkeadaban, menunjukkan reaksinya di masyarakat. Di satu sisi terjadi euforia dalam berebut kekuasaan atas nama daulat rakyat, sementara di sisi lain, kelompok yang termarginalisasikan, berideologi menghalalkan kekerasan sebagai instrumen jihad, dan kekuatan yang berbeda kepentingan mencoba mencari dan mengklaim wilayah kepentingan eksklusif dan sektoralnya masing-masing.

Dari situlah, diantaranya teroris berhasil membangun kekuatan jaringan, menguatkan organisasi, dan menjalankan serta menikmati kran membentuk dan meluaskan gerakan-gerakannya. Teroris menjadi bagian dari sisi negatif euforia seseorang dan sekelompok orang dalam bermasyarakat, berebut pengakuan, “pembahasan” ketimpangan dan ketidakadilan secara liberalistik dan permisifistik, serta klaim kebenaran yang dijadikannya sebagai logika atau dalil pembenarannya. Teroris akhirnya tampil sebagai salah satu “penguji” serius dan mengerikan terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam ranah itu, teroris ternyata juga mendapatkan pengakuan publik dunia sebagai kekuatan istimewa yang tidak bisa ditinggalkan

atau diakui eksistensinya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump secara tidak langsung merupakan bentuk pengakuan terhadap terorisme, artinya dengan sikap Trump itu, kekuatan teroris terbaca menjadi kekuatan "adidaya".

Perlu dipahami lagi secara cerdas, bahwa Indonesia sebagai negara yang berpenduduk Islam terbesar di dunia ini telah diberikan label sebagai negara sarang Terorisme. label ini disebabkan terjadinya rentetan peristiwa teror antara lain pemboman di Legian Kuta Bali yang menelan korban ratusan orang meninggal dunia. Pemberian label ini tidak merugikan Indonesia, tetapi menguntungkan terorisme, karena dengan label ini, teroris bisa saja merasa sepaik terjangnya telah sukses menarik perhatian dunia dan diposisikan sebagai salah satu kekuatan hebat di muka bumi ini.

Peristiwa tersebut (di Legian Bali) itu juga yang mendorong dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa serangan terorisme sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan Internasional, sehingga, semua anggota PBB harus bekerja sama untuk memerangi terorisme. Penyikapan yang ditunjukkan oleh PBB ini semakin memosisikan terorisme sebagai kejahatan yang menyita masyarakat dunia. Teroris sukses menunjukan dirinya sebagai "rezim kecil" yang diperhitungkan dunia.

Trump Salah Paradigma

Trump merupakan salah satu Presiden AS yang paling "terbuka" sikap antipatinya terhadap Islam. Misalnya dalam kaitannya dengan imigran, Trump bermaksud menerapkan kebijakan itu berlatar pada peristiwa penabrakan di New York yang dilakukan sopir truk asal

Usbekistan yang menewaskan 10 orang dan melukai beberapa orang. Insiden ini rupanya membuat Trump marah dan bermaksud memperkuat kebijakan politik luar negerinya yang berelasi dengan pembatasan imigran.

Dalam ranah itu, Trump identik dengan meyakini asumsi selama ini, bahwa dalam komunitas Islam terdapat ancaman serius yang bisa membahayakan konstruksi global, khususnya Amerika yang telah menstigmakan dirinya sebagai polisi dunia.

Kebijakan Trump seperti itu sebenarnya merupakan lanjutan kebijakan sebelumnya yang juga bermaksud memproteksi AS dari ancaman berbagai kelompok radikal yang berasal dari luar (imigran). Trump sejak awal dilantik langsung mengampanyekan produk kebijakan politik luar negerinya yang menempatkan terorisme, terutama mengalahkan "kelompok teror Islam radikal" sebagai target utama.

Trump pernah marah besar saat terjadinya pembantaian di klub gay yang menewaskan 50 orang oleh Omar Mateen. Trump mengaku sudah memperingatkan dengan keras aksi terorisme di AS itu. Serangan di Orlando "hanyalah awal" dan itu menegaskan komitmennya untuk melarangan migran Muslim memasuki AS.

Koran-koran AS itu memberitakan, bahwa Omar Mateen adalah pria AS keturunan Afghanistan. Sebelum beraksi, dia menghubungi 911 dan bersumpah setia pada ISIS. Dari sinilah AS membuat konklusi gampang, bahwa kasus pembantaian itu adalah produk terorisme ISIS.

Saat menjadi kandidat Presiden AS, Trump sudah menunjukkan kegeramannya bukan hanya dengan terorisme, tetapi juga dengan Islam. Di mata Trump, kaum muslim tidak

selayaknya mendapatkan tempat tinggal di AS. Terbukti misalnya Materi iklan pertama kampanye Trump yang berisi larangan warga muslim masuk AS. Trump mengatakan "Islam memicu kebencian terhadap Amerika" dan selama pemerintah masih mencari tahu akar persoalan tersebut, ada baiknya semua orang Islam tak dibolehkan atau dilarag masuk ke Amerika. Tentu saja pernyataan ini langsung memicu kecaman baik dari dalam maupun luar Amerika, termasuk dari Kementerian Pertahanan, yang menyebut pernyataan tersebut membahayakan keamanan Amerika.

Iklan pertama yang dipasang Trump yang disiarkan berbagai stasiun televisi di Amerika juga memasukkan janjinya melumpuhkan ISIS dan menyita minyak mereka. Dalam iklan ini, dimasukkan pula seruan untuk menghentikan arus imigrasi dari Meksiko Trump menganggarkan dana tak kurang dari US\$2 juta per pekan untuk kampanye melalui televisi.

Saat sudah jadi Presiden, kebijakan Trump jelas makin mudah dibaca, apalagi Trump memang gencar berikrar atau berjanji hendak menyatukan dunia melawan terorisme Islam radikal dan akan membasmi sepenuhnya dari muka bumi ini.

Selain itu, dalam pernyataan yang berjudul Kebijakan Luar Negeri Amerika yang Pertama, pemerintahan Trump mengatakan, mengalahkan ISIS dan kelompok-kelompok teror Islam radikal lainnya akan menjadi prioritas tertinggi kami.

Untuk mengalahkan dan menghancurkan ISIS dan kelompok yang sejenis, pemerintahan akan mencari atau membangun kerja sama agresif dan koalisi operasi militer bila diperlukan, memotong dana untuk kelompok teroris, memperluas jaringan berbagi data intelijen dan menggunakan sumber daya siber

untuk mengganggu propaganda dan upaya perekrutan ISIS.

Kebijakan politik Trump itu sejatinya juga sebagai diskresi politik luar negerinya Presiden Barack Obama. Dalam ranah penanggulangan terorisme, Obama saat itu juga menggalang kerjasama sama dengan sekutu Eropa dan Timur Tengah dalam kampanye pengeboman yang menargetkan pemimpin ISIS dan infrastruktur minyaknya, otorisasi operasi pasukan khusus AS terhadap kelompok itu, dan menggunakan sanksi dan metode lainnya untuk memotong aliran pembiayaannya.

Berbagai kebijakan yang diproduksi oleh Trump itu akankah mampu menghentikan atau setidaknya mengurangi ancaman terorisme? atau apakah terorisme yang berkembang di dunia ini akan mampu diatasi oleh Trump dan sekutu-sekutunya.

Imigran yang bermaksud bekerja di Amerika atau di negara-negara maju lainnya mempunyai hak untuk menjatuhkan opsi kerja dan keberlanjutan hidupnya, sehingga upaya Trump dengan cara melakukan pengetatan imigran yang bermaksud bekerja tidak beralasan.

Selain itu, kebijakan pengetatan dalam seleksi kerja global ini berlawanan dengan prinsip universalitas perlindungan HAM bidang kerja tiap warga bangsa di muka bumi. Sudah dijelaskan dalam Piagam HAM yang dikenal dengan UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) yang disahkan berlakunya 10 Desember 1948 pasal 2 ayat (1) bahwa: setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan, bebas memilih pekerjaan, syarat-syarat yang adil, dan menyenangkan dari suatu lingkungan pekerjaan dan mendapat perlindungan dari pengangguran.

Sebagai telaah perbandingan yang juga perlu dipahami, bahwa

respon terhadap terorisme tidak hanya muncul karena serangan 11 September 2001. Terorisme sudah menjadi musuh peradaban dunia. Selama lebih dari 35 tahun, misalnya para pembuat kebijakan, pengacara dan para akademisi berusaha mengembangkan model perlawanan terorisme yang efektif. Dalam mengembangkan prinsip ini, para ahli sepakat bahwa kampanye yang ditujukan untuk memerangi terorisme global, termasuk seperti yang dilakukan oleh Trump, harus sesuai dengan prinsip demokrasi liberal dan aturan hukum yang ketat. Sebagaimana ditegaskan oleh seorang akademisi Inggris, Paul Wilkinson tujuan utama strategi perlawanan terhadap terorisme haruslah melindungi dan mempertahankan demokrasi. Disamping itu upaya mempertahankan demokrasi membutuhkan penghargaan atas 3 nilai dasar masyarakat demokrasi yakni: kebebasan sipil, hak asasi manusia dan aturan hukum.

Paul M.A. Walewski menyebut, bahwa dengan acuan pada pentingnya hak asasi manusia, perlu adanya kesesuaian dengan prinsip hukum yang dibentuk dalam perjanjian internasional, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* (ECHR). Syarat ini ditegaskan oleh Resolusi 54/164 Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), yang mengatakan bahwa semua tindakan untuk melawan terorisme harus memiliki kesesuaian yang ketat dengan ketentuan hukum internasional yang relevan, termasuk standar hak-hak asasi manusia. Akibatnya, negara seperti Inggris, yang secara signifikan mengembangkan standar hak asasi manusia, bertanggungjawab menegakkan hak-hak ini, bahkan selama kondisi darurat.

Selain soal opsi hak (HAM) kerja itu, terorisme sebenarnya merupakan problem “kasuistik” yang jika pelakunya berasal dari elemen komunitas radikal atau eksklusif, sehingga jelas bukan soal doktrin agama, melainkan pada sisi keyakinan atau pandangan masing-masing pemeluknya.

Trump seharusnya melihat atau membaca dalam konteks makro, bahwa di setiap agama, termasuk Islam, mesti sulit menghindari keragaman atau perbedaan di kalangan pemeluknya, baik perbedaan dalam menyikapi eksistensi masing-masing agama maupun doktrin yang tertulis dalam kitab suci yang disampaikan melalui para nabiNya.

Konstruksi Islam Rahmatan Lil-Alamin

Rupanya Trump belum benar-benar memahami kalau Islam tidaklah seperti anggapannya. Islam secara universal tidak seperti yang dilakukan oleh kelompok minoritas yang menjadikan terorisme dan radikalisme sebagai “proyek” dakwah atau aktifitas eksklusif doktrin agamanya.

Fakta lain juga seharusnya dibaca secara cermat oleh Trump, bahwa secara khusus untuk Indonesia, pelaku terorisme di negeri ini bukan hanya warga negara Indonesia, namun ada beberapa diantaranya orang asing yang dengan keahliannya merekrut pemuda-pemuda Indonesia untuk meledakkan bom di tanah airnya sendiri dan menimbulkan korban yang tidak sedikit yaitu saudara-saudaranya sendiri.

Beberapa pelaku peristiwa peledakkan bom di tanah air sering mengatasnamakan Islam, dan bahkan membawa nama kelompok Islam tertentu. Terlepas klaim itu ada kaitannya dengan politik kepentingan global atau eksklusifitas kelompok

tertentu, yang jelas aksi kekerasan itu bukanlah wujud implementasi doktrin Islam. Sebaliknya, perilaku itu berlawanan dengan ajaran Islam itu sendiri. Islam merupakan agama rahmat untuk seluruh alam semesta (*rahmatan lil-alamin*). Karakter dasar ini seharusnya menjadi landasan bagi semua institusi yang menyandarkan garis perjuangannya pada Islam. Islam yang berasal dari kata "*salima*" yang berarti selamat, adalah agama yang bermisikan melindungi hak keselamatan manusia. Sabda Nabi Muhammad SAW secara jelas dan tegas menyebutkan, bahwa dinamakan (sebagai pemeluk) Islam apabila orang lain dapat selamat dari ucapan dan perbuannya.

Selain itu, yang perlu dipahami oleh Trump, bahwa kesalahan paradigma barat terus terulang atau sengaja diulang-ulang berkaitan dengan sejumlah istilah fundamentalisme, radikalisme dan terorisme. Ketiganya seringkali digunakan untuk hal atau kasus yang sama, seperti ketika terjadi ledakan bom oleh sekelompok teroris, maka ini diidentikkan sebagai wujud ketiganya (fundamentalis, radikal, dan teroris).

Perlu ditelaah lebih mendalam oleh pemikir dan pemimpin barat, khususnya Trump, bahwa "fundamentalisme" atau dalam bahasa Arab dikenal "*al-ushuliyah*" berarti "mendasar atau berdisiplin dalam menjalankan kewajiban agama". Jika ini pijakannya, maka "muslim fundamental" adalah seorang muslim yang sangat disiplin dalam menjalankan ajaran Islam, seperti shalat lima waktu secara berjamaah dan menghindari sesuatu yang tidak jelas kehalalannya, termasuk "muslim fundamental" ini adalah para "zahid", orang-orang yang menjaga diri dan agamanya dan juga para sufi. Dalam konteks pengertian ini, umat Islam

diserukan untuk melaksanakan ajaran agamanya secara fundamental. Sedangkan "radikalisme" dalam bahasa Arab disebut "*syiddah at-tanatu*". Artinya, keras, eksklusif, berpikiran sempit, rigid, serta memonopoli kebenaran. Muslim radikal adalah orang Islam yang berpikiran sempit, kaku (tidak fleksibel) dalam memahami dan mengimani Islam, serta bersifat eksklusif dan "minor" dalam memandang agama-agama lainnya.

Selain itu, memang di Indonesia ini, isu yang sedang dan bahkan barangkali akan dihadapi oleh masyarakat dan negara adalah terorisme yang dipicu karena radikalisme agama, seperti yang dinyatakan oleh beberapa akademisi di Indonesia. Aksi radikalisme agama ini diwarnai oleh teror bom di berbagai daerah di Indonesia yang terjadi sejak 1980-an dan menjadi semakin sering terjadi pada 2000-an ke atas.

Tampak ada suatu ketakutan luar biasa pada diri Trump. Barangkali Trump mencoba mengaitkannya dengan sepak terjang imigran yang mampu merebut "panggung" politik lewat melalui aksi-aksinya bertepatan kebangkitan Islam. Disebut oleh Imdadun Rahmat, bahwa gelombang revivalisme (kebangkitan) Islam di timur tengah muncul pada dekade ke tujuh abad ke 20 M. Kurun waktu yang bertepatan dengan momentum abad baru hijriah, abad ke 15. Sebuah momentum yang terkait dengan kepercayaan umat Islam, bahwa setiap abad baru akan melahirkan seorang pembaharu (*mujaddid*) keyakinan umat dan perbaikan kondisi komunitas umat Islam. Sejak dekade inilah gerakan-gerakan Islam berada di panggung utama, dari Malaysia sampai Senegal, dari Soviet atau Rusia sampai daerah-daerah pinggiran di Eropa yang dihuni oleh para imigran.

Pemikir kenamaan yang mengupas tentang sejumlah peristiwa menarik dalam perkembangan Islam menceritakan, misalnya ketika Khalifah Umar memasuki kota Jerussalem, Uskup dari Makam suci Kristus menawarkan untuk menunaikan shalat di dalam gereja, namun Umar memilih salat di luar pintu.

Uskup itu bertanya pada Umar, "mengapa tuan tidak mau masuk ke gereja kami? Jika saya sudah salat di tempat suci kalian, para pengikut saya dan orang-orang yang datang ke sini pada masa yang akan datang akan mengambil alih bangunan ini dan mengubahnya menjadi sebuah masjid. Mereka akan menghancurkan tempat ibadah kalian. Untuk menghindari kesulitan-kesulitan ini dan agar gereja kalian tetap terjaga, maka saya memilih salat di luar", demikian penjelasan Umar.

Pesan itu mengingatkan Uskup atau pihak elitis keagamaan gereja tentang makna pluralisme, multikulturalisme, dan kebebasan beragama atau cara berelasi dengan Tuhan secara inklusif-humanistik, meski Khalifah Umar juga memberikan *warning* mengenai kemungkinan adanya sekelompok orang yang berlaku radikal dan bermaksud menggusur tempat ibadah.

Tempat ibadah merupakan cermin suci dan mendasar bagi komunitas beragama, sehingga ketika Uskup itu menawarkan shalat di dalam gereja, khalifah tidak semata berfikir tentang agama yang sedang dipeluknya, tetapi juga menjatuhkan sikap politik keagamaan yang arif, bening, demokratis, dan prospektif humanistik, bahwa di kemudian hari, yang harus ditegakkan pemeluk agama apapun.

Keputusan itu juga bukan dimaksudkan untuk tidak toleran dan

apalagi melecehkan terhadap demokratisasi keagamaan yang ditawarkan pihak Uskup, tetapi sebagai wujud advokasi kepentingan komunitas beragama lain dari kemungkinan tangan-tangan radikal kelompok lainnya yang berhaluan eksklusif dan ekstrimistik.

Trump seharusnya "mempelajari" Islam seperti yang dilakukan Uskup itu atau mengadaptasikan Islam dari sisi doktrin dan komitmen kemanusiaan dan universalitasnya yang disebar melalui prinsip Islam *rahmatan lil alamin* di muka bumi ini. Abdul Muchith Muzadi menyebut, bahwa dengan Islam *rahmatan lil alamin* mampu membuat para *muballighin* (penyebar dan pembawa agama) yang menyampaikan ajaran Islam dengan penuh keramahan, kedamaian dan kebijaksanaan, mudah diterima oleh masyarakat dengan kerelaan tanpa perlawanan dan reaksi radikalistik. Makna "rahmat" adalah *al-Riqqatu wa al-Ta'attufi* (kelembutan yang berkonvergensi dengan rasa keibaan). Ibnu Faris mendefinisikan kata ini dengan merujuk kepada makna kelembutan hati, belas kasih dan kehalusan. Dari akar kata ini, lahir kata *rahima* yang memiliki arti ikatan darah, persaudaraan dan hubungan kerabat. Sikap dan perbuatan ini diantaranya ditujukan untuk menjaga keberlanjutan ekologis dan melindungi hak hidup sesama manusia.

Pemikiran itu menunjukkan, bahwa Islam berkedudukan sebagai agama yang bersifat universal, humanis, dinamis, kontekstual dan akan abadi sepanjang masa. Agama Islam memiliki kitab suci resmi, orisinal dari Allah Swt, dengan rasul terakhirNya yang bernama Muhammad. Allah Swt memberikannya al-Qur'an sebagai panduan hidup umatnya yang bersifat

universal, yang bisa digunakan manusia untuk membentuk dirinya menjadi humanis atau menjalankan tugasnya sebagai *khalifah fil ardl*. Allah tidak saja memberikan panduan hidup, seperti al-Qur'an untuk umat Nabi Muhammad kepada salah satu agama yang diturunkanNya saja, melainkan juga pernah diturunkanNya kepada umat-umat (masyarakat) sebelumnya kepada nabi-nabi lainnya.

Dalam ranah wahyu ilahi, pemeluk Islam diharuskan menganut ajaran Islam secara totalitas (Qs. al-Baqarah/2: 208), tidak boleh menduakannya dengan menganut kepercayaan di luar Islam (Qs. Ali Imrân/3: 85) dan tidak boleh ada keraguan terhadap al-Qur'an (Qs. al-Baqarah/2: 2). Bukti kepercayaan atau keyakinan pemeluk Islam terhadap ajarannya adalah selalu berlaku sopan-santun, penuh kedamaian, lemah-lembut dan tidak saling menganiaya atau tidak saling membenarkan pola radikalistik (Qs. Yûsuf/12: 23), baik lintas agama, lintas manusia, lintas kelompok, lintas etnis dan lintas suku dan tidak menggunakan kekerasan dan membenarkan pola kekerasannya ini dengan justifikasi ayat-ayat al-Qur'an.

Kondisi umat Islam saat ini (secara keseluruhan) belum mampu atau tidak mampu, mengimplementasikan agamanya dengan baik dan benar. Ketidakmampuan itu menjadi salah satu penghalang hadirnya Islam dengan penuh kesejukan dan kedamaian. Sekelompok orang dalam komunitas Islam membentuk pola berfikir dan bersikap kalau seseorang atau sekelompok orang lain tidak termasuk golongannya atau tidak berprediket "seagama". Dalam ranah inilah citra agama Islam tercoreng karena ada segolongan orang menjadi pemeluk paling benar di muka bumi, padahal di kalangan pemeluk Islam

sendiri terdapat keragaman. Atas dasar inilah, apa yang disebut Muhammad Abduh bahwa ketinggian "ajaran Islam tertutup oleh perilaku umat Muslim" sendiri (*Al-Islâm mahjûbun bil-Muslimîn*), tidaklah salah.

Pemeluk agama Islam yang memilih jalan eksklusif itu memang jumlahnya kecil, namun akibat klaim kebenaran yang dipublikasikan hingga menjadi dikenal dunia, membuat segolongan kelompok kecil ini digunakan sebagai salah satu indikasi utama oleh masyarakat internasional, khususnya yang selama ini tidak menyukai agama Islam.

Sekelompok kecil itu juga gencar berupaya mencari popularitas dengan cara mengembangkan atau memprogresifitaskan gerakan-gerakannya, khususnya saat menggunakan pola kekerasan sebagai bagian dari gerakan beratasnamakan ayat-ayata suci, sehingga oleh masyarakat dunia dijadikannya sebagai representasi kalau doktrin Islam memang membuka ruang lebar terhadap terorisme.

Muhammad Iqbal juga pernah menyatakan bahwa kemunduran kaum Muslimin bukanlah disebabkan ajaran agamanya, tetapi kesalahan terletak pada diri masing-masing pribadinya. Mereka keliru dalam memahami ajaran agama lantaran kejumudannya. Kadangkala apa yang diamalkan bertolak belakang dengan sumber aslinya. Pemahaman yang keliru akan melahirkan tindakan yang keliru pula. Ironisnya, jika mempertahankan pemikirannya dengan cara apa pun. Bersumber atau berakar dari kejumudan dalam beragama yang memang sedang dialami oleh sebagian umat Muslim inilah tindakan kekerasan atas nama agama lahir, atau radikalisme atau terorisme bisa terbentuk oleh pola berfikir liberal yang salah atau sesat. Mereka ini

menilai bahwa kekerasan merupakan bagian dari ekspresi kebebasan bergama yang dapat dijadikan opsi dalam menentukan langkah-langkah tertentu untuk memperjuangkan agama.

Pemikir keagamaan Ninan Koshy, yang mengutip pendapat Carillo de Albornoz membagi kebebasan beragama ke dalam empat aspek, *pertama*, kebebasan nurani (*liberty of conscience*), *kedua*, kebebasan mengekspresikan keyakinan keagamaan (*liberty of religious expression*), *ketiga*, kebebasan melakukan perkumpulan keagamaan (*liberty of religious association*) atau hak membentuk atau membangun organisasi keagamaan, *keempat* kebebasan menginstitusikan keagamaan (*liberty of religious institutionalization*). Hak mengespresikan keyakinan dan membangun organisasi keagamaan seperti ini bisa saja disalahinterpretasikan oleh seseorang atau sekelompok pemeluk agama dengan menempatkan radikalisme atau terorisme sebagai resiko pilihan beragama.

Pemikiran atau interpretasi itu mengandung konsekuensi, bahwa kedudukan pemeluk agama lain, wajib diperlakukan sebagai subyek yang bermartabat sebagaimana umat Islam memproteksi keselamatan hidupnya sendiri. Secara universal, doktrin Islam menuntut pemeluknya untuk berjihad mempertaruhkan jiwa dan raganya demi memproteksi hak keberlanjutan hidup pemeluk agama apapun di muka bumi, dan menolak setiap upaya bercorak predatorisme sesama dalam ranah lokal hingga global.

Jihad dalam konteks tersebut jelas bukan bermakna penghancuran, apalagi sampai pembumihangusan. Jihad ini berkaitan dengan gerakan

atau aktifitas penegakan *Islam rahmatan lil alamin*. Jihad mengandung arti “kemampuan” yang menuntut sang mujahid mengeluarkan segala daya dan kemampuannya demi mencapai tujuan. Karena itu, jihad adalah pengorbanan, dan dengan demikian seseorang yang menjadi *mujahid* tidak menuntut atau mengambil, tetapi memberi semua yang dimilikinya. Ketika memberi, *mujahid* tidak berhenti sebelum tujuannya tercapai atau yang dimilikinya habis. Said Aqil Siraj mengatakan bahwa, tema jihad itu sendiri berasal dari kata “*jahada*”, berarti usaha atau upaya. Derivasinya, *jahada*, *yajhadu*, *jihad*, dan *mujahada*, sehingga mendiskusikan jihad berarti membicarakan juga derivasi atau *mustaqqat*-nya, yaitu *istihad* dan *mujahada* berasal dari satu akar kata yang bermakna keseriusan dan kesungguhan. Keseriusan dan kesungguhan disini bermakna upaya maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap keselamatan sesama, mengusahakan kemakmuran dan terwujudnya kebahagiaan.

Jihad menurut agama Islam adalah sebagai penyempurnaan segenap ibadah, karena jihad itulah tiang ibadat sebagai perwujudan dari cinta kasih kepada Allah seorang hamba rela merelakan jiwa dan raganya serta harta bendanya dalam perjuangan. Perjuangan dimaksud adalah untuk mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kehormatan atas dasar nilai-nilai kemanusiaan. Terorisme sebagai kekerasan politik sepenuhnya bertentangan dengan etos kemanusiaan.

Trump dan Indonesia

Selain logika yang bersifat “bantahan” terhadap kebijakan Trump atau paradigmanya yang salah terhadap Islam, tetap ada aspek positif yang bisa digunakan sebagai refleksi,

bahwa apa yang ditunjukkan Trump terhadap masyarakat Muslim, merupakan tantangan untuk merekonstruksi komitmen negara (Indonesia) dan masyarakat dalam konstruksi strategis terhadap penanggulangan terorisme.

Dalam kasus aksi teror misalnya, bisa dibayangkan jika gelagat aksi teroris itu tidak tercium keamanan, di negeri ini mungkin sudah 'hujan bom' di mana-mana, karena dari beberapa kasus yang terbongkar, para teroris itu hidup di tengah-tengah warga, tetapi warga tidak mencium adanya keanehan kalau seseorang atau sejumlah orang di sekitarnya adalah teroris. Sensitivitas sebagian masyarakat kita terhadap embrio terorisme diindikasikan telah meredup. Bahkan, ada gejala warga apatis di mana-mana atau lebih sibuk memikirkan kepentingan eksklusifnya masing-masing.

Tindakan terorisme merupakan suatu tindakan yang terencana, terorganisir dan berlaku dimana saja dan kepada siapa saja. Tindakan teror bisa dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai kehendak yang melakukan, yakni teror yang berakibat fisik atau non fisik (psikis). Tindakan teror fisik biasanya berakibat pada fisik (badan) seseorang bahkan sampai pada kematian, seperti pemukulan/penganiayaan, pembunuhan, peledakan bom dan lainnya. Dalam bentuk non fisik (psikis) bisa dilakukan dengan penyebaran isu, ancaman, penyendaraan, menakut-nakuti dan sebagainya. Akibat dari tindakan teror, kondisi korban teror menjadi merasa tidak aman dan dalam kondisi rasa takut (traumatis). Selain berakibat pada orang atau kelompok orang, juga dapat berdampak makro terhadap kehidupan ekonomi, politik dan kedaulatan suatu negara. Tindakan

terorisme yang sulit terdeteksi dan berdampak sangat besar atau itu, harus mendapat solusi pencegahan dan penanggulangannya serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Begitu mudahnya anak muda atau sejumlah elemen masyarakat terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang mengarah pada separatisme atau terjebak dan tertipu terhadap "iming-iming" yang dijanjikan para teroris yang mendoktrinnya agar bersedia menjadi pelaku teror yang menghancurkan bangsanya sendiri, jelas menunjukkan rasa nasionalismenya sangat rendah terhadap negara ini dan sesamanya. Kondisi demikian ini potensial dapat mengganggu keyakinan penduduk lain akan kedaulatan bangsa ini. Seharusnya pilihan salah tersebut dapat dihindari apabila generasi (komunitas) muda dari bangsa ini lebih mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi. Sebagai pilar utama masyarakat, mereka seharusnya menjadi pejuang-pejuang (*mujahid*) yang benar atau pejuang yang benar-benar memahami kalau kesejatan dirinya sebagai *khalifah fil ardl* adalah menunjukkan aktifitas berbasis penegakan Islam *rahmatan lil-alamin*, diantaranya ditunjukkan dengan mengalahkan siapapun yang bermaksud mengajaknya melakukan dan memperluas terorisme.

Pemikiran lain juga mengingatkan, bahwa rasa nasionalisme yang menurun di kalangan komunitas muda adalah berkaitan erat dengan kondisi psikologisnya. Labilitas kejiwaannya akibat menghadapi revolusi budaya, ekonomi, dan politik bisa membuat doktrin-doktrin tentang separatisme, radikalisme atau eksklusivitas beragama (spiritualisme) menjadi lebih mudah dimasukkan kedalam pikiran atau jiwanya. Mereka ini harus

terus menerus diedukasikan tentang cara membaca progresifitas dengan nalar jernih, khususnya dalam memahami urgensinya doktrin Islam *rahmatan lil-alamin*.

Masyarakat merupakan salah satu pilar solusi. Wujud awal solusinya, masyarakat tidak boleh menyerahkan urusan terorisme semata-mata kepada aparat keamanan (polisi), tetapi juga kepada semua kekuatan (elemen sosial), seperti kalangan kaum muda. Negeri dengan lebih dari 17 ribu pulau dan 230 juta rakyat ini terlalu luas untuk hanya diawasi sekitar 400 ribu polisi. Negara dengan berbagai perangkatnya tidak boleh mengabaikannya, karena sudah terbukti, bahwa kekerasan di negeri ini identik pepatah patah tumbuh hilang berganti. Aksi terorisme dapat terbaca sebagai salah satu jenis kejahatan, layaknya tindak pidana korupsi, yang akan atau potensial bisa terus mengguncang negeri ini. Hal ini karena akar tunjangnya telah tertanam beberapa tahun yang lampau. Ia merupakan akumulasi dari beragam konvergensi kepentingan, kekecewaan, juga dendam. Selama akar tunjang terorisme tidak dibabat, ia akan terus tumbuh dari tunas-tunas baru menjadi kelompok kekuatan baru, tapi dengan ideologi yang sama dan dukungan instrumen kekerasan.

Tugas membabat akar tunjang terorisme itu sangat jelas bukan hanya di pundak aparat keamanan, apalagi hanya diserahkan kepada Densus 88 Antiteror, melainkan juga menjadi kewajiban seluruh elemen bangsa. Albert Einstein pernah mengingatkan, bahwa dunia ini tidak aman dihuni bukan hanya karena ulah penjahatnya, tetapi akibat sikap kita yang mendiamkan kejahatan terjadi.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan ancaman yang sangat serius terhadap

peradaban manusia, keutuhan dan kedaulatan suatu Negara. Terorisme juga bukan saja sebagai kejahatan local atau nasional, tetapi sudah menjadi kejahatan transnasional bahkan internasional. Aksi-aksi yang dilakukan oleh pelakunya telah terbukti mengakibatkan jatuhnya korban manusia, harta benda, dan hilangnya kedamaian hidup sebagai warga bangsa. Kondisi ini seharusnya terbaca sebagai dampak makro dan serius akibat ulah para teroris.

Terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan dan dicapai, target-target serta metode terorisme kini semakin luas dan bervariasi, sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*), sehingga masyarakat atau bangsa manapun, apalagi masyarakat Indonesia berkewajiban untuk menunjukkan reaksi strategisnya dalam penanggulangan terhadap terorisme.

Menurut Azyumardi Azra, untuk memahami fenomena terorisme tidak hanya dilakukan melalui tindakan berbasis keagamaan, tapi tindakan yang bersifat peningkatan kesejahteraan ekonomi dan perlindungan sosial juga harus dilakukan secara bersamaan. Jika dilihat akar radikalisme itu sendiri terjadi dari akar ketidakadilan, maka bukan hanya akibat tindakan oligarkhi pemerintah Amerika Serikat, tetapi problem kemiskinan dan kesulitan ekonomi yang membelenggu kalangan umat juga menjadi penyebabnya. Dalam ranah ini, kehadiran Islam yang menyejahterakan (memenuhi

kemaslahatan masyarakat), yang merupakan salah satu substansi dari Islam *rahmatan lil alamin* menjadi solusinya.

Syafi'i Ma'arif, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, berpendapat bahwa setidaknya ada tiga teori yang menyebabkan adanya gerakan radikal dan tumbuh suburnya gerakan transnasional ekspansif, *pertama*, adalah kegagalan umat Islam dalam menghadapi arus modernitas sehingga mereka mencari dalil agama untuk "menghibur diri" dalam sebuah dunia yang dibayangkan belum tercemar, *kedua*, adalah dorongan rasa kesetiakawanan terhadap beberapa negara Islam yang mengalami konflik, seperti Afghanistan, Irak, Suriah, Mesir, Kashmir, dan Palestina, *dan* ketiga, dalam lingkup Indonesia, adalah kegagalan negara mewujudkan cita-cita negara yang berupa keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata.

Dalam tulisan Ahyar secara umum juga disebutkan, bahwa proses upaya deradikalisasi (anti terorisme) membutuhkan kerja keras dari semua pihak mulai dari aparat keamanan dengan penegakan hukum atau *law enforcement*-nya, para hakim dengan keadilannya, akademisi (termasuk periset) dengan keilmuan atau pengetahuannya, pendidik (dosen, guru, ulama, dan tokoh-tokoh agama), pembuat kebijakan (*policy maker*), ekonom, elite politik hingga *non-government organization* (NGO) atau lembaga-lembaga yang dibangun dengan semangat demokrasi lainnya.

Pemikiran itu tidak lepas dari beberapa temuan riset tentang terorisme. Dari sejumlah riset mengenai modus operandi terorisme, diantaranya ditengarai, bahwa jaringan teroris di Indonesia ternyata lebih besar dan lebih berpengalaman dari yang selama ini dipikirkan oleh banyak pihak. Analisis *International*

Crisis Group (ICG) mengatakan perekrutan anggota baru dalam jaringan yang dibangun Noordin M Top dan Dr. Ashari (keduanya telah tewas), dan lainnya ternyata dilakukan dengan sangat mudah. Jaringan pun diindikasikan terus berkembang dan semakin meluas di tanah air. Terorisme ini menjadi deskripsi serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Kondisi demikian menunjukkan, bahwa selain warga (masyarakat) yang menjadi korbannya, masyarakat dan negara juga dituntut supaya menunjukkan kekuatannya kalau dirinya tidak pantas menjadi obyek (korban) teroris,

Konsekuensi dari dinamika atau progresifitas terorisme adalah negara dan masyarakat tidak boleh lagi mendiamkan (tidak boleh pasif, apalagi apatis) terhadap embrio terorisme yang bermula dari beragam penyakit seperti kekecewaan, ketidakadilan, aksi kekerasan sporadis yang dibiarkan berlangsung liberal, dan klaim-klaim kebenaran dengan menempatkan sesama sebagai obyek pembenaran melakukan radikalisasi.

Dalam ranah itu, atas nama apa pun radikalsime atau terorisme itu dilakukan, selain masyarakat, utamanya negara tidak boleh absen atau membiarkannya. Negara memang harus tampil untuk memberantasnya, karena selain teroris tidak akan mungkin mati, teroris juga berkecenderungan terus berkembang sesuai dengan kepentingan-kepentingannya. Disamping tuntutan pada negara ini, masyarakat

berkewajiban menunjukkan sikap pro aktifnya dalam membaca berbagai jenis bibit terorisme yang tumbuh, khususnya terhadap munculnya berbagai aliran eksklusif dan “separatis” yang mengembangkan doktrin pembolean kekerasan atau pembunuhan sebagai kebenaran Islam.

Negara atau masyarakat seharusnya sudah memahami, bahwa seperti perang melawan korupsi, perang melawan terorisme membutuhkan komitmen luar biasa, energi luar biasa, juga cara-cara yang luar biasa. Jihad melawan dan mengalahkan terorisme merupakan jihad yang berlangsung sepanjang hidup negeri

Sebagai reaksi terhadap perkembangan dan akselerasi terorisme, juga dibutuhkan rekonstruksi semangat jihad anti terorisme atau pembumian deradikalisasi dengan menguatkan dan memprogresifitaskan komitmen terhadap ekologis sosial atau tidak menutup mata terhadap perkembangan berbagai bentuk dinamika aliran, perbedaan, dan berbagai jenis penyakit yang berelasi dengan terorisme yang potensial menjadi ancaman semakin serius terhadap stabilitas dan keutuhan NKRI.

Dalam ranah itu, wajarlah kalau ada Presiden atau pimpinan negara seperti Trump atau Jokowi yang menunjukkan reaksi marah luar biasa saat menyikapi terjadinya pengeboman yang dilakukan teroris. Terlepas kebijakan yang dilakukan oleh Trump merugikan umat Islam atau kita memosisikan Trump sebagai Presiden yang belum memahami kesejatan Islam *rahmatan lil-alamin*, namun setidaknya Trump, sebagaimana kalangan ilmunan atau pemikir Barat lainnya, yang mengidentikkan Islam dengan terorisme atau radikalisme, telah

mengingatkan secara “radikal” bahwa dalam diri kita (pemeluk Islam), memang terdapat varian pola pemahaman dan pengamalan doktrin keagamaan, meskipun tergolong minoritas, yang diantaranya membolehkan dan membenarkan radikalisme.

Simpulan

Reaksi yang ditunjukkan oleh Presiden AS Donal J. Trump. Reaksi Trump terhadap pemeluk agama Islam, khususnya kelompok imigran muslim yang dianggap telah menjadi kelompok paling bertanggungjawab terhadap terorisme dengan cara mengeluarkan diskresi yang melarang mereka masuk ke Amerika Serikat, dapat dikategorikan reaksi berbobot kebencian. Reaksi demikian ini juga dinilai oleh banyak pihak sebagai reaksi yang tidak rasional, karena menempatkan Islam dan komunitas muslim sebagai musuh utama. Trump layak dianggap sebagai Presiden yang belum benar-benar memahami kehadiran agama Islam diantara agama-agama lain di muka bumi. Trump tidak atau belum melihat kesejatan misi Islam yang bersubstansi *rahmatan lil alamin*, yakni agama Islam yang menghormati atau melindungi umat beragama apapun di muka bumi dengan cara kasih sayang.

Atas dasar kesejatan memproteksi hak keberlanjutan hidup keharmonisan, keselamatan, dan kesejahteraan pemeluk agama apapun di muka bumi, khususnya umat Islam, maka sekarang dan ke depan, Trump yang wajib merestorasi pemikiran dan diskresi kebencian “membabibuta” terhadap para imigran muslim, termasuk yang berasal dari Indonesia. Kalau hal ini ditunjukkan oleh Trump, maka dia bisa menjadi Presiden atau salah satu pemimpin dunia yang

benar-benar menghormati kesejatan universalitas HAM.

Daftar Rujukan

- Abdul Muchith Muzadi, 2006, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, Surabaya: Khalista.
- Abi Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya, 1979, *Mu'jam Maqâ'yîsu al-Lughati*, di-tahqiq Abd Salam Muhammad Harun, Vol. 2, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Abraham Milasovi, 2011, *Regenerasi Teroris*, Jakarta: LP2KI bekerjasama dengan Pusat Kajian Hak Asasi Manusia.
- Frans Hendra Winata, *Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia*, <https://nasional.sindonews.com/read/1218270/18/pencegahan-dan-penanggulangan-terorisme-di-indonesia-1499276811>, akses 11 Januari 2018.
- Hairuz Syani, 2016 *Membedah akar-akar Terorisme di Indonesia (membandingkan dengan beberapa Negara)*, Surabaya: FK2TI.
- Hamka, 1970, *Falsafah Hidup*, Jakarta: Jaya Murni.
- Ibnu Mandzur, 1999, *Lisânul Arab*, Vol. 5, Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-Arabi.
- Imam Munawwir, 1983, *Salah Paham Terhadap al-Qur'an*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Likha Ika, *Terorisme di Indonesia*, <http://likha-ika.blogspot.com/2012/01/makalah-terorisme-di-indonesia.html>, akses 5 Januari 2018.
- M. Imdadun Rahmat, 2005, *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- M. Quraish Shihab, 1996, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.
- Masdar Ali, 2016, *Terorisme dan Sumbe Pendanaannya*, Pusat Kajian Anti Radikalisme dan Terorisme, Malang, 12 September 2016
- Mudzakkir, 2008, *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi korban Terorisme*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Mulyana W. Kusumah, 2002, *Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum*, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III, Desember, Jakarta.
- Ninan Koshy, 1992, *Religious Freedom in a Changing World*, Geneva" WCC Publications.
- S. Endriyono, 2005, *Terorisme Ancaman Sepanjang Masa*, Semarang: Media Agung Persada.
- Said Aqil Siroj, 2006, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, Bandung: Mizan dan Yayasan Ikhlas.
- Sulianto Rahardjo, 2017, *Bersama Mencegah Tumbuhberkembangnya Bibit-bibit Terorisme di Indonesia*, Pusat Kajian Peradaban dan Kemanusiaan, Surabaya, 12 September 2017.
- Thomas W. Arnold, tt, *Sejarah Da'wah Islam*, terj. Nawawi Rambe, Jakarta: Wijaya.